



Efektivitas World Bank dalam Menangani Kasus Gender-based Violence (GBV) di Provinsi Kivu Republik Demokratik Congo, 2014 - 2017

Naila Najiha

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Gender Based Violence (GBV) means violence within a heterosexual relationship, in which the male partner attacks their partner, the victims of this violence are mostly women and this term is integrated with the idea of *'male superiority over women'*. After Congo War II, mining sites in Kivu Province of the Democratic Republic of Congo (DRC) are mainly controlled by ex-combatants and armed groups. The mining sites become unregulated and dangerous where violations of human rights including GBV are rampant. GBV in Kivu Province have huge impacts on Human Security, especially on Health Security, Economic Security, and Personal Security. Therefore World Bank as world financial institution which promote and embody Human Security cooperate with DRC government to eradicate GBV in Kivu Province. World Bank then conduct program to tackle GBV cases in Kivu Province that will be the focus of this research. The Program that will be the focus of this research is *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*. This research analyze the effectiveness of World Bank's programs using three main indicators of effectiveness: *output, outcome, and impact*.

Keywords : Gender-based Violence (GBV), Human Security, Democratic Republic of Congo (DRC), Kivu Province, World Bank, Effectiveness

Pendahuluan

Sejarah kasus kekerasan berbasis gender atau GBV di Republik Demokratik Congo (RDC) bermula dari perang Congo II. (ITUC, 2011). Keberadaan militan bekas Perang Congo II tersebutlah yang kemudian memicu terjadinya kekerasan berbasis gender di wilayah Timur Republik Demokratik Congo. Menurut observasi United Nations Population Fund (UNFPA), dari bulan Januari sampai September 2014, tercatat 11.769 kasus kekerasan seksual dan berbasis gender di provinsi Kivu Utara, Kivu Selatan, Orientale, Katanga dan Maniema; 39% kasus ini dilakukan oleh kelompok bersenjata. Pada tahun 2013, Kivu Utara dan Orientale tetap menjadi provinsi yang paling terpengaruh oleh kekerasan seksual karena adanya konflik bersenjata, dengan 42% dari semua insiden yang terjadi di Orientale (United Nations, 2015).

Kasus kekerasan berbasis gender ini bersumber dari area pertambangan di Provinsi Kivu yang kaya akan batu-batu mineral, dimana pada lokasi tambang banyak kelompok militan yang menguasai pertambangan-pertambangan tersebut (Human Rights Watch, 2009). Pemerksaan, prostitusi, pernikahan paksa dan kekerasan domestik merupakan tindakan kekerasan berbasis gender yang merajalela di daerah pertambangan berskala kecil di Provinsi Kivu. Dimana dalam

wilayah tersebut, 60 persen dari pekerja tambang, penyortir, transporter, dan pemasok disana merupakan perempuan dan anak-anak (USAID, 2016).

Meskipun Pemerintahan RDC memiliki hukum yang melindungi rakyatnya dari tindak kekerasan dan adanya tindakan hukum yang cukup berat bagi pelanggarnya, dengan banyaknya jumlah pertambangan berskala kecil yang tidak memiliki aturan-aturan yang jelas, fenomena kekerasan berbasis gender terus terjadi di pertambangan-pertambangan tersebut. Keadaan wilayah-wilayah pertambangan berskala kecil di RDC yang hampir sama sekali tidak diatur oleh hukum dan struktur perekonomian yang insentif merupakan dua faktor utama yang menyebabkan kasus kekerasan berbasis gender di wilayah-wilayah pertambangan berskala kecil di bagian Timur RDC terus berlanjut dan tidak terkendali.

Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual berbasis gender di bagian selatan Provinsi Kivu ini mulai menarik perhatian internasional. Institusi-institusi internasional seperti PBB, *United States Agency for International Development* (UNSAID), *International Trade Union Confederation* (ITUC) dan World Bank telah banyak memberikan kontribusi dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender di RDC. World Bank merupakan institusi finansial internasional yang memiliki tujuan dan peranan dalam mewujudkan *human security*, *human welfare* dan *human freedom*. Peranan World Bank tidak terlepas dari kasus kekerasan berbasis gender di RDC. World Bank berkontribusi dalam menangani hal tersebut sehingga keadaan tidak semakin memburuk dan dapat terkendali (World Bank, 2017).

World Bank sendiri telah banyak melakukan berbagai usaha dengan membentuk berbagai macam program demi meningkatkan kesejahteraan RDC. World Bank mengadakan program yang dikhususkan untuk menangani GBV di RDC, yaitu Program *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*, program ini diadakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengobatan dan pencegahan GBV di Provinsi Kivu bagian Utara dan Selatan. Program ini yang akan menjadi fokus penelitian ini, karenanya penelitian ini akan menganalisis efektifitas Program *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* World Bank dalam menangani permasalahan kekerasan berbasis gender di Provinsi Kivu, Republik Demokratik Congo. Jangkauan penelitian ini hanya pada wilayah Provinsi Kivu, Republik Demokratik Congo pada tahun 2014 hingga tahun 2017. Dimana pada tahun 2014 hingga 2017 merupakan tahun beroperasinya program World Bank, *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*.

Pembahasan

Kekerasan Berbasis Gender di Provinsi Kivu Republik Demokratik Congo

Kekerasan berbasis gender yang terjadi di wilayah Provinsi Kivu Selatan merupakan sebuah fenomena yang telah terjadi sejak lama. Dimana kasus kekerasan seksual terhadap perempuan disana terjadi sejak perang Congo. Pada masa perang Congo kekerasan seksual menjadi fenomena global yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 1991 hingga 2003 Green (2004) mendata sebanyak 24 konflik bersenjata dimana kasus perempuan dan anak kecil diperkosa terjadi secara besar-besaran (Elbert, et al., 2013). Johnson (2010) melakukan penelitian di rumah sakit Panzi di provinsi kivu Selatan dan *The Head of Africa / Doctors on Call for Services* (DOCS) dan menemukan data bahwa pada tahun 1996 hingga 2003 minimal ratusan ribu perempuan diperkosa (Johnson, et al., 2011). Meskipun Perang Congo telah berakhir, GBV terutama pemerkosaan terhadap perempuan disana masih terus terjadi, dimana Provinsi Kivu merupakan wilayah yang rentan terhadap konflik dan pasca perang Congo, wilayah ini masih dalam masa pemulihan yang sama sekali belum sempurna.

Selain kekerasan seksual, diskriminasi sosial dan ekonomi terhadap perempuan RDC juga terjadi. Meskipun hukum dan konstitusi RDC menyatakan perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan yang setara dengan pria. Akan tetapi kenyataannya di pertambangan Provinsi Kivu, tugas yang diberikan pada wanita sangat terbatas (Perks, 2010). Di Provinsi Kivu perempuan jarang berpartisipasi dalam aktivitas utama pertambangan, melainkan mengerjakan pekerjaan sampingan seperti memindahkan batu-batu tambang, menghancurkan batu-batu, dan memilah hasil tambang. Selain pekerjaan sampingan, perempuan juga melakukan jasa menjual alkohol, makanan, sabun, dan menjadi pembantu bahkan hingga menyediakan jasa prostitusi (ITUC, 2011). Di area pertambangan perempuan pada umumnya dibayar lebih rendah dari laki-laki dengan pekerjaan mengurus tenaga yang setara dengan laki-laki (ITUC, 2011).

Dikarenakan pendapatan yang tidak mencukupi perempuan di Provinsi Kivu cenderung memilih pekerjaan sampingan sebagai prostitusi. Prostitusi sendiri telah menjadi penghasilan utama bagi perempuan RDC di area pertambangan, meskipun tidak semua laki-laki membayar jasa yang mereka dapat (Perks, 2010). Selain prostitusi, pernikahan secara paksa juga merupakan hal yang biasa di area pertambangan dan cenderung terjadi kekerasan seksual setelahnya. Biasanya laki-laki tambang akan memilih untuk mengambil gadis sebagai istri kedua atau perempuan simpanan ketika menetap di pertambangan. Banyak kasus dimana perempuan dipaksa untuk menjadi perempuan simpanan setelah mereka di perkosa (ITUC, 2011).

Kekerasan berbasis gender seperti pemerkosaan, kekerasan domestic, pelecehan, diskriminasi ekonomi dan sosial, prostitusi paksa dan pernikahan paksa menjadi fenomena umum yang tidak jarang terjadi di daerah Provinsi Kivu, terutama area pertambangan. Hal-hal tersebut banyak berdampak pada perempuan-perempuan Congo, dimana mereka yang menjadi korban utama. Dampak negative yang muncul sebagai konsekuensi dari GBV mengancam kesejahteraan RDC, dimana dampak GBV mengancam keamanan Kesehatan, Keamanan Ekonomi, dan Keamanan Personal. Isu kesehatan merupakan dampak utama yang menyerang perempuan-perempuan Congo, kemudian dampak lainnya seperti dampak sosial dan ekonomi pun juga dirasakan oleh perempuan-perempuan Congo. Dampak kesehatan yang diderita perempuan Congo umumnya adalah sakit atau luka fisik hingga infeksi menular seksual atau *sexually transmitted infections* (STIs) seperti HIV/AIDS. *Amnesty International* memperkirakan jumlah kasus infeksi HIV di RDC mencapai 20-30% dari jumlah pasien yang terdata di rumah sakit di RDC (ITUC, 2011).

Sedangkan dampak GBV yang mengancam Keamanan Ekonomi berupa banyaknya jumlah korban perempuan yang pada akhirnya tidak mampu kembali bekerja. Sedangkan total 74% perempuan yang bekerja di ladang menjadi korban kekerasan seksual tentunya hal tersebut akan memberikan efek negatif terhadap perekonomian RDC yang berpangku di bidang agrikultural (HHI, 2010). Sedangkan dampak terhadap Keamanan Personal selain dampak langsung seperti luka-luka dan sakit akibat kekerasan seksual, korban juga menerima dampak sosial berupa stigma-stigma negatif yang diterima perempuan oleh masyarakat sekitar dan ditinggalkan oleh pasangannya.

Efektifitas World Bank dalam Menangani Kasus Gender-based Violence (GBV) di Provinsi Kivu Republik Demokratik Congo

World Bank sebagai Organisasi Internasional yang dibentuk demi mewujudkan *human security*, *human welfare* dan *human freedom*, memiliki peranan dalam mengatasi kasus GBV di Provinsi Kivu yang mengancam Keamanan Manusia. Dimana GBV merupakan kekerasan yang

didasari oleh gender atau sifat biologis manusia. Istilah GBV sering juga disebut sebagai *violence against woman*. Istilah ini menegaskan dimensi gender dimana status perempuan sebagai bawahan di masyarakat dan kerentanan perempuan terhadap kekerasan yang berakar dari norma-norma budaya (Bartel, et al., 2014). Norma-norma budaya seperti, maskulin dan feminim, harga diri pria, kepatuhan perempuan, hak seksual pria, telah mengakar di RDC, terutama di Provinsi Kivu.

Kasus GBV seperti pemerkosaan, kekerasan domestik, pelecehan, diskriminasi ekonomi dan sosial, prostitusi paksa dan pernikahan paksa yang merupakan fenomena umum dan tidak jarang terjadi di daerah Provinsi Kivu. Fenomena tersebut menyebabkan *insecurity* dan pada dasarnya mengancam *economic security*, *health security*, dan *personal security* yang merupakan dimensi cakupan Keamanan Manusia. Sehingga World Bank memiliki peranan dalam menangani kasus GBV di RDC. World Bank sendiri merupakan bentuk nyata dari konsep Keamanan Manusia yang menekankan pada Pendekatan Komprehensif, yaitu menekankan pada kerjasama internasional dalam mewujudkan Keamanan Manusia. Sehingga World Bank melakukan kerjasama dengan pemerintahan RDC untuk menangani kekerasan berbasis gender yang merupakan ancaman bagi Keamanan Manusia.

Dalam usaha World Bank menangani kasus GBV, World Bank menempatkan korban GBV di Provinsi Kivu sebagai pusat analisis sesuai dengan karakteristik *people-centered* dalam konsep Keamanan Manusia. Kemudian World Bank fokus pada pendekatan konteks khusus dan pendekatan *prevention oriented* dalam mengadakan program *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* yang di bentuk untuk menangani permasalahan GBV di Provinsi Kivu. Program ini dirancang untuk memberikan perlindungan pada korban GBV dalam bentuk memberikan layanan dasar sekaligus meningkatkan pemberdayaan masyarakat Provinsi Kivu.

Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* ini untuk mencegah dan meminimalisir kasus GBV yang berdampak negatif pada sosial dan ekonomi di Provinsi Kivu. Proyek ini disetujui pada April 2014 dan mulai dijalankan pada Desember 2014, kemudian berakhir pada Januari 2017. Tujuan utama dari proyek ini adalah menguji coba dan mengevaluasi pendekatan inovatif dalam pencegahan GBV dan menyediakan layanan bagi para korban GBV (World Bank, 2014).

Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*, memiliki tiga kegiatan utama, yaitu *Prevention and Service Province* dan *Local Ownership on Addressing SGBV*, dan yang terakhir adalah Manajemen Proyek. Kegiatan *Prevention and Service Province* dibagi menjadi dua kegiatan. Kegiatan pertama adalah Pencegahan, berupa tindakan-tindakan pencegahan dan sensitisasi melalui pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di masyarakat, seperti pelatihan bisnis, asosiasi simpan pinjam dan diskusi ekonomi, edukasi komunitas, pemberdayaan ekonomi dan pelatihan rujukan kasus SGBV.

Kegiatan kedua adalah Akses Pelayanan Dasar, dimana kegiatan ini akan fokus pada akses layanan dasar bagi korban GBV, yaitu layanan medis, psikologis, dan hukum (World Bank, 2014). Sedangkan *Local Ownership on Addressing SGBV* bertujuan untuk mengelaborasi, menguji, dan menerapkan aturan-aturan untuk mengevaluasi dan memantau kualitas organisasi lokal dan lembaga yang menyediakan layanan psikososial dan hukum bagi para korban GBV (World Bank, 2014). Sedangkan Manajemen Proyek mencakup semua kegiatan yang terkait dengan koordinasi dan pengawasan proyek, termasuk aspek logistik pelaksanaan proyek, koordinasi tim operasional Kivu Utara dan Kivu Selatan (World Bank, 2014).

Dalam penelitian efektifitas ini penulis telah menentukan indikator-indikator yang akan digunakan untuk menganalisis efektifitas program-program World Bank tersebut. Indikator

pertama *Output*, dibagi menjadi tiga sub indikator yakni, (1) Pendanaan Program, (2) Pengadaan Staf, (3) Pengadaan Fasilitas. Indikator yang kedua adalah *Outcome*, dibagi menjadi dua sub indikator yakni (1) implementasi yang baik dari Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*, (2) pengaruh penerapan Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian indikator yang ketiga adalah *Impact*, yakni Pengaruh Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* dalam penurunan jumlah tindak Kekerasan Berbasis Gender di wilayah Provinsi Kivu, RDC.

Indikator pertama, yaitu *Output* yang terdiri dari tiga sub indikator, 1) Pendanaan Program, 2) Pengadaan Staf, 3) Pengadaan Fasilitas. Sub-indikator pertama, yaitu Pendanaan Program. Pencairan dana untuk proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* berhasil turun sebanyak 1.575.796 USD yang berarti baru mencapai 39% dari total anggaran Proyek (World Bank, 2016), sehingga sub-indikator belum berhasil dikarenakan jumlah pencairan dana yang belum mencapai 100%. Sub-indikator kedua, Pengadaan Staf dinyatakan efektif dimana Pengadaan staf tepat sasaran, yaitu mengikuti fokus proyek yang membutuhkan banyak pengadaan staf. Pembelanjaan untuk pengadaan staf sejumlah 412.676 USD dimana mengisi 40% dari total pengeluaran proyek (World Bank, 2016). Sub-indikator ketiga, yaitu Pengadaan Fasilitas. Sub-indikator ini dinyatakan efektif dimana pembelanjaan untuk pengadaan fasilitas sejumlah 100.797, yaitu 10% dari total pengeluaran proyek (World Bank, 2016). Jumlah tersebut dinilai tepat sasaran, dimana konsentrasi proyek tidak pada pembangunan fasilitas. Dengan total nilai bobot untuk Indikator *Output* sebesar 83, indikator *Output* dinyatakan efektif.

Kemudian Indikator kedua yaitu, *Outcome* dibagi menjadi dua sub-indikator, 1) Implementasi yang baik dari Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu*, 2) Pengaruh Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* terhadap kebijakan pemerintah. Sub-indikator pertama Implementasi Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* dalam prosesnya mengalami kendala. Dimana tiga Program kegiatan mengalami *contract delay*. Program kegiatan pertama yang mengalami *contract delay* adalah penyediaan layanan bantuan material ke wilayah-wilayah terpencil di Provinsi Kivu Selatan. Program kegiatan ini direncanakan selesai pada bulan Maret 2016 pada kontak awal, tetapi mundur 9 bulan dan selesai pada bulan Desember 2016 (World Bank, 2017).

Program kegiatan kedua yang mengalami *contract delay* adalah Program pelatihan bisnis untuk anggota VLSA menggunakan metodologi CAFÉ bersama dengan partner-partner LSM lainnya di Provinsi Kivu Selatan. Program ini direncanakan selesai pada Februari 2016, tetapi mundur 2 bulan, sehingga program terselesaikan pada bulan Mei 2016 (World Bank, 2017). Kemudian program kegiatan terakhir yang mengalami *contract delay* adalah implementasi Program *Local Ownership on Addressing SGBV*. Program ini mengalami *contract delay* sebanyak dua kali. Program seharusnya sudah diluncurkan pada April 2015 – Februari 2016. Kemudian mengalami *Contract delay* yang pertama yang kemudian mengajukan perpanjangan kontrak menjadi Maret 2016 hingga Juni 2016. Kemudian Program ini kembali mengajukan perpanjangan kontrak tetapi ditolak oleh World Bank (World Bank, 2017).

Sedangkan sub-indikator kedua, yaitu pengaruh Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* terhadap kebijakan pemerintah. Proyek ini berkontribusi dalam kebijakan pemerintah, dimana pemerintah mendukung melalui kampanye dan perbaikan kerangka hukum. Kebijakan pemerintah yang mendukung Proyek adalah (OHCHR, 2014): (1)

Inisiatif politik dan diplomatik dalam perjanjian perdamaian dan proses demokrasi, termasuk perjanjian Addis Ababa dan deklarasi Nairobi; (2) Pemerintah RDC telah berinisiatif dalam mempromosikan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk reformasi sistem peradilan, dan meningkatkan kerangka hukum; (3) Pembentukan hukum baru dalam *Labour Code* yang memastikan tersedianya layanan sosial yang lebih baik bagi perempuan; (4) Menjadikan partisipasi perempuan dalam isu politik dan publik sebagai prioritas; (5) Pemerintah RDC mengesahkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berdasarkan *Paris Principle*; (6) Pemerintah membentuk 8 Pengadilan baru untuk anak-anak di 10 Provinsi, mengadakan rehabilitasi anak dan mengintegrasikan kembali anak-anak korban tentara anak ke masyarakat dan sistem sekolah; (7) *Criminal Code* disesuaikan dengan Statuta Roma. Sehingga Indikator *Outcome* dinyatakan efektif dengan nilai bobot 75.

Yang terakhir adalah indikator *impact*, yaitu pengaruh Proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* dalam penurunan kasus GBV. Secara keseluruhan jumlah kasus GBV di provinsi berkonflik di RDC mengalami kenaikan selama periode proyek berjalan. Pada tahun 2015 tercatat 1900 kasus, sedangkan pada tahun 2016 terdapat 2593 kasus, kemudian meningkat menjadi 5783 di tahun 2017 (OHCHR, 2014). Dikarenakan tidak ada penurunan kasus GBV selama periode proyek berjalan, Indikator *Impact* dinyatakan tidak efektif.

Kesimpulan

World Bank sebagai Organisasi Internasional yang dibentuk demi mewujudkan *human security*, *human welfare* dan *human freedom*, memiliki peranan dalam mengatasi kasus GBV di Provinsi Kivu yang mengancam Keamanan Manusia. Sehingga kemudian World Bank mengadakan program *DRC: Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* yang dibentuk untuk menangani permasalahan GBV di Provinsi Kivu. Berdasarkan hasil analisa efektifitas menggunakan tiga indikator efektifitas, yaitu *Output*, *Outcome*, dan *Impact*, proyek *DRC Prevention and Mitigation of SGBV in North and South Kivu* dinyatakan efektif. Dimana dua dari tiga indikator utama berjalan dengan efektif.

Referensi

- Bartel, D., Bloom, S., Levy, J., Karim, N., Stefanik, L., Kincaid, M., & Grimes, K. (2014). Guidance for Gender Based Violence (GBV) Monitoring and Mitigation. *CARE Gender and Empowerment*, 1-23.
- Elbert, T., Hinkel, H., Hermenau, A. M., Hecker, T., Schauer, M., Riedke, H., . . . Lancaster, P. (2013). *Learning on Gender & Conflict in Africa*, 1-102.
- HHI. (2010). *Now the world is without me: An investigation of Sexual Violence in Eastern Democratic Republic of Congo*. Cambridge: Harvard Humanitarian Initiative.
- Human Rights Watch. (2009). *Soldiers Who Rape, Commanders Who Condone: Sexual Violence and Military Reform in the Democratic Republic of Congo*. Retrieved from Human Rights Watch Report: <https://www.hrw.org/report/2009/07/16/soldiers-who-rape-commanders-who-condone/sexual-violence-and-military-reform>
- ITUC. (2011). Violence against women in Eastern Democratic Republic of Congo: Whose responsibility? Whose complicity? *ITUC: Violence in DRC*, 1-36.
- Johnson, K., Scott, J., Rughita, B., Kisielewski, M., Asher, J., Ong, R., & Lawry, L. (2011). Association of sexual violence and human rights violations with physical and mental health in territories of the Eastern Democratic Republic of the Congo. *JAMA*, 553-562.

- Lauterbach, C., & Zuckerman, E. (2013). Assessing the effectiveness of World Bank investments. *World Institute for Development Economic Research*, 1-59.
- OHCHR. (2014, April 29). *Universal Periodic Review – MEDIA BRIEF*. Retrieved from United Nations Human Rights Council:
<https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Highlights29April2014am.aspx>
- Perks, R. (2010). *Towards a Post-Conflict Transition: Women and Artisanal Mining in the Democratic Republic of Congo*. Gendering the Field.
- Pratt, M., & Werchick, L. (2004). *Sexual Terrorism: Rape as a Weapon of War in Eastern Democratic Republic of Congo*. USAID/DCHA ASSESSMENT REPORT.
- Simister, J. (2012). More Than a Billion Women Face ‘Gender Based Violence’ ; Where Are Most Victims? *Springer Science*, 607–623.
- UN. (2007, February 2). *Human Rights Watch*. Retrieved from D.R. Congo: Arrest Laurent Nkunda For War Crimes Military and U.N. Should Act to Protect Civilians:
<http://www.hrw.org/news/2006/02/01/dr-congo-arrest-laurent-nkunda-war-crimes>.
- UNFPA. (2014). *Gender equality and women’s empowerment - Congo, the Democratic Republic*. Retrieved from United Nations Population Fund:
<https://www.unfpa.org/data/adolescent-youth/CD>
- United Nations. (2015). *Sexual Violation in Conflict: Democratic Republic of the Congo*. Retrieved from Sexual Violation in Conflict:
<http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/>
- USAID. (2016). *Sexual And Gender-Based Violence Fact Sheet*. Retrieved from United States Agency for International Development: <https://www.usaid.gov/democratic-republic-congo/fact-sheets/usaid-drc-fact-sheet-sexual-and-gender-based-violence>
- WHO. (2013, June 20). *Violence against women: a ‘global health problem of epidemic proportions’*. Retrieved from Media Centre:
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/violence_against_women_20130620/en/
- World Bank. (2008). *Growth with Governance in the Mining Sector*. Democratic Republic of Congo: World Bank.
- World Bank. (2014). *Integrated Safeguard Data Sheet: Concept Stage*. World Bank.
- World Bank. (2014). *Project Information Document (PID): Concept Stage*. Washington, D.C.: World Bank.
- World Bank. (2015). *History*. Retrieved from World Bank:
<http://www.worldbank.org/en/about/archives/history>
- World Bank. (2016). *WORLD BANK GROUP Gender Strategy FY16-23: Gender Equality, Poverty Reduction, and Inclusive Growth*. World Bank.
- World Bank. (2017, September 22). *Gender Overview*. Retrieved from World Bank:
<http://www.worldbank.org/en/topic/gender/overview#1>
- World Bank. (2017). *Simplified Procurement Plan for Small and Micro Grants*. World Bank.
- World Bank. (2017). *Who We Are*. Retrieved from The World Bank:
<http://www.worldbank.org/en/who-we-are>